PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Darmi Yanti

NPM 1711021045

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Darmi Yanti

Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, Tingkat Pengangguran dan PDB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Data PanelHasil peneltiian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara dana transfer dengan pertumbuhan ekonomi , adanya hubungan negatif dan signifikan antara PDB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi dan ntuk variabel Tingkat Pengangguran memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini dikarenakan adanya peningkatan angka pengangguran di beberapa daerah di Kabupaten Provinsi Lampung

Kata kunci : Dana Transfer, Tingkat Pengangguran Terbuka, PDB deflator

ABSTRACT

THE EFFECT OF CENTRAL TO REGIONAL TRANSFER FUNDS ON ECONOMIC GROWTH IN DISTRICT/CITY LAMPUNG PROVINCE

By

Darmi Yanti

The purpose of this study is to see the effect namely special allocation funds and profit sharing funds as well as the unemployment rate and GDP deflator on economic growth in the Regency/City of Lampung Province. The analytical method used in this study is the Panel Data Analysis method.. The results of this study indicate that there is a positive and significant relationship between transfer funds and economic growth, there is a negative and significant relationship between the GDP deflator on economic growth and the unemployment rate variable has a negative but not significant relationship with economic growth in this study due to an increase in the unemployment rate. in several areas in the Regency of Lampung Province.

Keywords : Fund Transfer, Open Unemployment Rate, GDP deflator

PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Darmi Yanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: **PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	: **Darmi Yanti**
Nomor Induk Mahasiswa	: **1711021045**
Program Studi	: **Ekonomi Pembangunan**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.
NIP 19770729 200501 1 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

Penguji II : **Dr. Arivina Ratih , S.E., M.M.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 April 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIZME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022

Darmi Yanti
NPM 1711021045

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 12 Maret 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Sudarmin, A.Md. dan Mini Juniarti.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMPN 22 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014 selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMAN 13 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur masuk SBMPTN. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) dibeberapa Instansi Kementrian yang terletak di DKI Jakarta serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Ketapang Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020.Selama menempuh pendidikan di kampus penulis tercatat dalam mengikuti kegiatan organisasi antara lain : anggota aktif di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA).Tidak banyak kegiatan organisasi kampus yang penulis ikuti saat menempuh pendidikan di Almamater tercinta dikarenakan penulis saat perkuliahan menyambi belajar dan berjualan aneka kue.

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, atas rahmat dan segala nikmat yang tak terhitung ...

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan baktiku kepada :

Alm.Papa Sudarmin, A.Md . dan Mama Mini Juniarti

Suamiku Miftahurrahman, S.E.

Papa mertua Drs. H. Imron Suhendi, M.Pd.

Mama mertua Hj. Ulfatul Jadidah, S.Pd.

Uwak Junaidi,S.Sos dan Uwak Anita

Keluarga besar Puyang Gaffar, Keluarga besar Kakek Mat Sata , keluarga besar Nenek Suparto jaya

Para pendidik dan teman – teman yang selalu memberikan semangat

Almamaterku tercinta

MOTTO

Jika Kamu tidak belajar dari kisah orang lain

sebagai pelajaran, maka

Kisah hidupmu lah yang akan jadi pelajaran

untuk oran lain

- Ami, 8 April 2021 -

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Transfer Pusat ke Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung”pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat nya di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus nya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si.,Akt. Wakil Dekan Bidang U dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak Muslimin, S.E., M.Sc. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

5. Ibu Neli Aida, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
6. Bapak Dedi Yuliawan, S.E., M.Si. Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. Pembahas yang telah banyak memberi masukkan, saran, ilmu dan kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi
8. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M. Pembahas yang telah memberi masukkan saran dan masukkan dalam penulisan skripsi
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung dan para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan
10. Kepada Instansi BPS dan DJPK kemenkeu terimakasi atas informasi yang telah diberikan melalui website nya
11. Untuk Suamiku Miftahurrahman, S.E. terimakasi selalu mensuport saya selama penulisan skripsi ini
12. Seluruh rekan – rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan 2017. Siti Urfah, Viki Ardela, Hikmatunnisa, Karina, Feni Setiani, Frans Simatupang dan teman – teman lain yang tidak bisa disebutkan persatu
13. Rekan KKN Desa Ketapang Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Feby Wulandari, Revina Damayanti, Desta Isnaini A, Fathir Rahman,

Resta Octavia dan Reynaldo Maulana terimakasi atas hari – hari yang indah dan petualangannya.

14. Terimakasih kepada diriku sendiri, sudah kuat dan mau berusaha pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu – persatu

Terimakasi atas bantuan serta ketulusan hati kalian semua semoga menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Aamiin Yra

Wasalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 03 Agustus 2022

Darmi Yanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori 11

2.2 Penelitian Terdahulu 44

2.3 Kerangka Pemikiran 47

2.4 Hipotesis 48

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian & sumber penelitian 49

3.2 Definisi Operasional Variabel 50

3.3 Batasan penelitian 52

3.4 Metode Analisis Data 52

3.5 Uji asumsi klasik 55

3.6 uji statistik 57

3.7 Uji pengaruh keseluruhan (uji f) 58

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis deskriptif……..…..60

4.2 Hasil estimasi 64

4.3 Pembahasan hasil penelitian 73

4.4 Implikasi hasil penelitian 76

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan 78

5.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 dana transfer pemerintah pusat ke daerah tahun 2015-2019 2

Tabel 1.2 DBH,DAK, pertumbuhan ekonomi prov lampung 3

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 32

Tabel 3.1 pengukuran variabel 39

Tabel 4.1 hasil analisis statistik deskriptif 47

Tabel 4.2 hasil uji heteroskedastisitas 49

Tabel 4.3 hasil uji multikolinieritas 49

Tabel 4.4 hasil uji chow 50

Tabel 4.5 hasil uji hausman 51

Tabel 4.6 hasil regresi model FEM 52

Tabel 4.7 interpretasi hasil estimasi model persamaan FEM 53

Tabel 4.8 hasil uji t 54

Tabel 4.9 hasil uji f 55

Tabel 4.10nilai *individual effect*.....56

Tabel 4.11 kondisi pertumbuhan ekonomi di ProvinsiLampung 58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 perbandingan rata-rata DBH dengan pertumbuhan ekonomi 4

Gambar 1.2 perbandingan rata-rata DAK dengan pertumbuhan ekonomi 5

Gambar 1.3 perbandingan rata rata TPT dengan pertumbuhan ekonomi 6

Gambar 1.4 grafik PDB Deflator indonesia 7

Gambar 1.5 inflasi Lampung tahun 2017 – 2018 8

Gambar 2.1 paradigma pemikiran 27

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Transfer Pusat ke daerah memiliki dampak pada kebijakan desentralisasi fiskal serta menjadi faktor penting terhadap dinamika pembangunan suatu daerah dan mempengaruhi kinerja perekonomian. Manfaat optimal dari dana transfer ini dapat diperoleh jika kemampuan keuangan memadai untuk pemerataan pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah untuk mengembangkan daerah dengan potensi nya masing – masing sehingga harapannya dapat meningkatkan perekonomian. Otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk beberapa sektor atau kebijakan. Kebijakan yang dapat diatur daerah antara lain menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan lain yang semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan penggunaan transfer dana perimbangan maupun dana yang bersumber dari pendapatan daerah atau penerimaan daerah yang sah.Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, telah membawa perubahan dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. (Chandra, 2017)

Menurut Wardhana dkk (2013) Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini adalah salah satu sumber dana utama bagi para pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah. Tujuan utama dari transfer ini adalah untuk mengurangi atau mengatasi ketimpangan yang terjadi antar

wilayah kabupaten/kota maupun provinsi yang ada di seluruh Indonesia.Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dilakukan dengan beberapa mekanisme antara lain, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa.Pada tabel dibawah ditampilkan data terkait dana transfer Indonesia dari 2015-2020.

Tabel 1.1Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Dana Transfer
2015	480.617.401.363.531
2016	628.165.310.767.753
2017	664.508.437.282.502
2018	666.661.302.614.038
2019	711.085.434.847.102

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasakan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah dana transfer Indonesia dari tahun ke tahun. Dapat dilihat jika dana transfer mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sangatlah serius dan berupaya semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan perekonomian tiap daerah.

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan.

Denganadanya dana transfer inidampaknya terhadap daerah adalah terstimulusnya perekonomian daerah. Salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi adalah Provinsi Lampung. Pada tabel dibawah, ditampilkan data pertumbuhan ekonomi, serta dana transfer di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2019

Tabel 1.2DBH, DAK, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Tahun	DBH	Growth	DAK
2015	Rp10.198.623	4,96	Rp149.637.151
2016	Rp14.439.370	5,15	Rp137.250.073
2017	Rp368.938.548	5,19	Rp1.556.070.311
2018	Rp468.200.955	5,30	Rp4.348.329.002
2019	Rp367.512.234	5,35	Rp3.727.330.789

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat jika pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Dapat dilihat juga jika pertumbuhan ekonomi naik seiring adanya kenaikan dana transfer dari pusat. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2016-2017, dimana pada tahun tersebut terjadi kenaikan dana transfer yang cukup besar (DBH dan DAK). Dimana DBH dan DAK meningkat lebih dari 3x lipat dari tahun sebelumnya.

Gambar 1.1 Perbandingan Rata – rata DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi

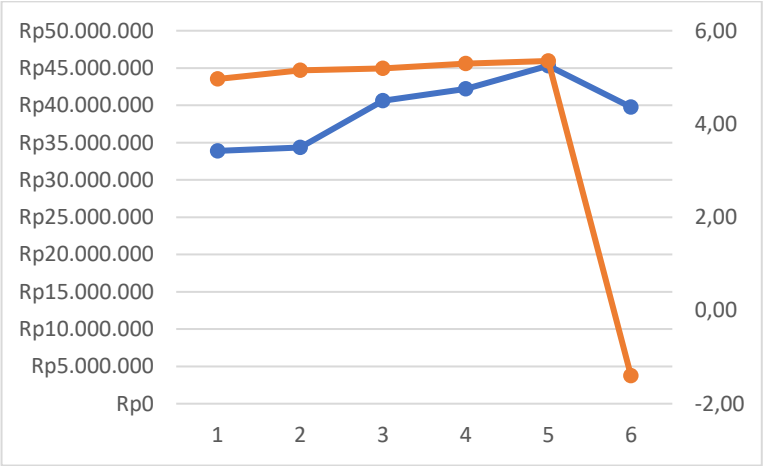

Sumber : BPS, Tahun 2021, Data diolah

Gambar 1.1 Perbandingan Rata-rata DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Lampung 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.1 variabel terikat Dana Bagi Hasil serta pertumbuhan ekonomi sama-sama memiliki trend yang meningkat .Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah. Berdasarkan toeri pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow, Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat

Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi Lampung tahun 2016 – 2018

Realisasi pendapatan	2016	2017	2018
Bagi Hasil Pajak	145.745.610	144.778.671	122.496.302
Bagi Hasil SDA	39.730.387	104.561.372	93.544.7614
Jumlah	5.588.722.511	6.813.542.148	8.489.814.070

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pembagian Dana Bagi Hasil Provinsi Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada pembagian DBH Pajak mengalami penurunan dari tahun 2016 – 2018 dikarenakan berkurangnya pendapatan yang diterima karena wajib pajak pada tahun berjalan tersebut kurangnya kesadaran untuk membayar pajak (BPS, 2017) tetapi pada DBH SDA mengalami kenaikan dari tahun 2016 – 2018

Hasilpenelitian yang dilakukan oleh Arina et al. (2019), dimana pada penelitian tersebut, dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu menurut Hasan (2015) dimana dalam penelitiannya, dari hasil analisis regresi dengan menggunakan panel data dan 2SLS mengenai variabel bebas Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Gambar 1.2 Perbandingan Rata – rata DAK dengan Pertumbuhan Ekonomi

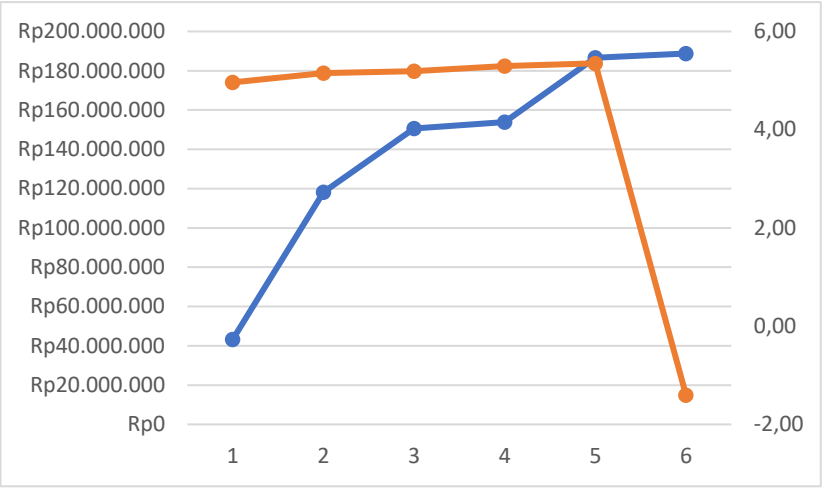

Sumber : BPS, Tahun 2021, Data diolah

Gambar 1.2 Perbandingan Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Lampung 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat jika Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga pertumbuhan ekonomi sama-sama menunjukan trend yang meingkat.Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kegiatan yang sudah diarahkan penggunaannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pencapaian prioritas nasional DAK sendiri terbagi menjadi 2 yaitu DAK fisik dan DAK non fisik sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data DAK non fisik. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow, Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat.

Tabel 1.4 Realisasi DAK Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019

DAK provinsi Lampung				
2015	2016	2017	2018	2019
1.556.070.311	4.348.329.002	3.727.330.789	4.063.718.911	3.489.893.736

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada pembagian Dana Alokasi Khusus Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2019 ini memiliki jumlah yang tidak menentu, hal ini disebabkan karena pembagian Dana Alokasi Khusus di bagi berdasarkan dengan kebutuhan khsus daerah yang sudah di tetapkan atau di prioritaskan (BPS,2018)

Menurut Ratih (2015) DAK memiliki hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat DAK belum mampu menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Akibatnya target pembangunan daerah tidak tercapai. Selain karena peran DAK adalah yang terkecil terhadap dana perimbangan (World Bank, 2010). DAK formula alternatif juga memiliki korelasi yang lebih baik dibanding formula existing saat dikorelasikan dengan dengan PDRB per kapita. Sedangkan menurut Putra (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kenaikan pemberian DAK dari pemerintah pusat ke pemerintah Sumatra Utara akan menaikkan petumbuhan ekonomi di Provinsi tersebut. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk keperluan daerah dengan dana tersebut maka pertumbuhan ekonomi di daerah Sumatra Utara dapat meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK dapat menaikkan ekonomi didaerah Sumatra Utara

Gambar 1.3 Perbandingan rata – rata TPT dengan pertumbuhan ekonomi

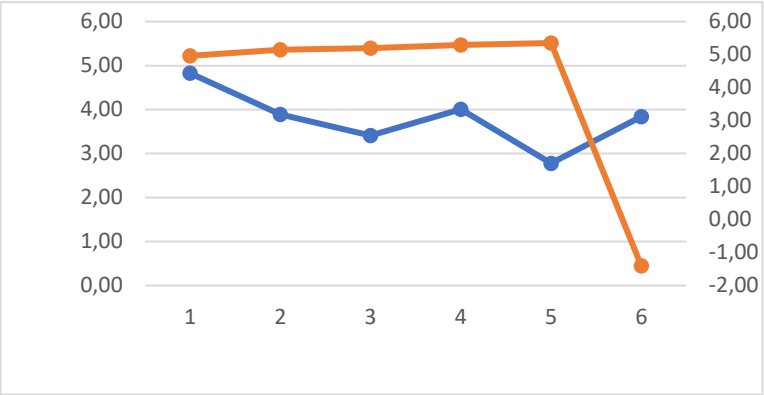

Sumber : BPS, Tahun 2021, Data diolah

Gambar 1.3 Perbandingan Rata-rata TPT dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Lampung 2015-2019

Tenaga kerja khususnya pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.Seperti yang diungkapakan olehSukirno (2011), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, serta tingkat pengangguran, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya pada kabupaten di Provinsi Lampung.

Gambar 1.4 Grafik PDB Deflator Indonesia

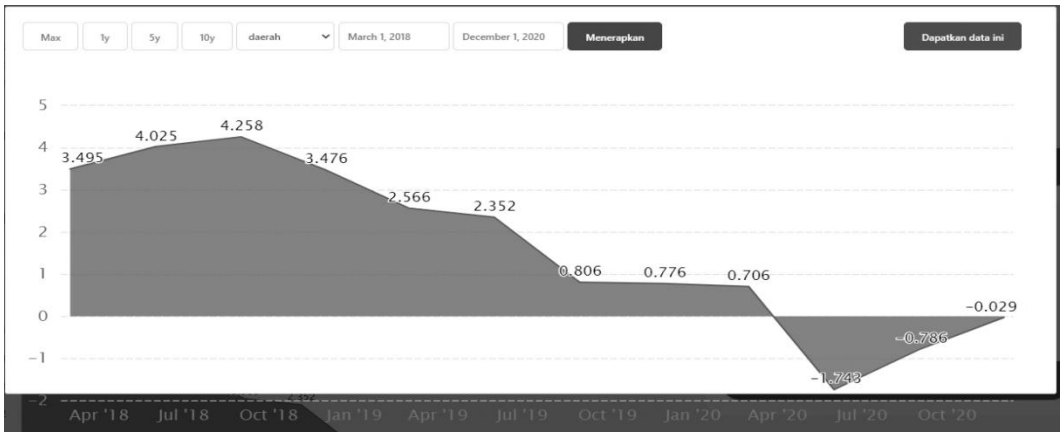

Sumber : ceicdata

Pertumbuhan PDB Deflator Indonesia dilaporkan sebesar -0,0% pada tahun 2020-12, rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu -0,8% untuk 2020-09. Data pertumbuhan PDB Deflator Indonesia diperbarui triwulanan, dengan rata – rata 6,5 % dari 1998-03 sampai 2020-12 dengan 92 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 93,2% pada tahun 1998-03 dan terendah sebesar -1,7% pada 2020-06

penelitian Purnama dan Johadi (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Gambar 1.5 Inflasi Tahun Kalender Lampung dan Indonesia (Persen), 2017-2019

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2019

Laju perubahan harga barang dan jasa di wilayah Provinsi Lampung menunjukkan perubahan harga gabungan di dua daerah perkotaan yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Berdasarkan penghitungan, inflasi yang terjadi selama tahun kalender JanuariDesember 2019 di Kota Bandar Lampung sebesar 3,53 persen sementara di Kota Metro tingkat inflasi lebih rendah pada level 2,97 persen. Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada tahun 2019 mencapai 3,44 persen.Kenaikan harga selama tahun 2019 relatif lebih tinggi dibanding tahun 2018. Inflasi tahun 2019 mencapai 3,44 persen sedangkan tahun 2018 mencapai 2,73 persen. Namun demikian, secara umum relatif masih terkendali. Jika dibandingkan dengan 80 kota lain yang menjadi daerah pemantauan harga, kenaikan harga di Provinsi Lampung lebih tinggi dari angka nasional. Inflasi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 2,72 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2018 yang sebesar 3,13 persen. Kenaikan harga di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro berturut-turut menempati peringkat 6 dan 16 secara Nasional. Kenaikan harga yang terjadi antara lain disebabkan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, dan pengaruh lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, dan inflasi yang terjadi pada mitra dagang. Secara umum seluruh barang kebutuhan mengalami kenaikan harga. Penyebab terjadinya inflasi yang tertinggi sepanjang tahun 2019 adalah kelompok komoditas bahan makanan dengan inflasi sebesar 5,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga terutama pada komoditas bumbu-bumbuan mencapai kenaikan harga 33,90 persen, sayuran naik 9,17 persen, dan buahbuahan naik 7,36 persen

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh dana transfer (DBH dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakan pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDB Deflator terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalahuntuk :

1. Untuk mengatahui pengaruh dana transfer pusat ke daerah (DBH dan DAK)terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan PDB Deflator terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui keterkaitan variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah

2.bagi akademisi untuk bisa jadi pertimbangan penelitian selanjutnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Fungsi Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian baik sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.

2. Fungsi pemerintah untuk meyelenggarakan peradilan.

3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dan sebagainya

Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannnya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktiknya menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini pemerintahmempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomain modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi

1. Peran Alokasi

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut, oleh karena setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

1. Peran Distribusi

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan.Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagaian tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri.Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat jugasecara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah misalnya: perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani dan sebagainya.

2. Peran Stabilisasi

Kebijakan stabiliasi digunakan untuk pencapaian tujuan makro secara optimal.Salah satu contoh kebijakan stabilisasi adalah penerapan policy mix atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Pengertian optimal di sini adalah pencapaian tujuan antar kebijakan dapat terkoordinasi sehingga tidak menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pencapaian tujuan kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan.Salah satu contoh penerapan bauran kebijakan yang banyak dikenal adalah bauran kebijakan fiskal-Moneter (monetary–fiscal policy mix). Secara konseptual koordinasi bauran kebijakan fiskal-moneter dapat dilakukan melalui beberapa scenario, yaitu:

(1) Kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal ekspansif

(2) Kebijakan moneter kontraktif/kebijakan fiskal ekspansif

(3) Kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal kontraktif

(4) kebijakan moneter kontraktif/kebijakan fiskal kontraktif

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian pertumbuhan ekonomi

Menurut Smith (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah (1) akumulasi modal, termasuk di dalamnya semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan petumbuhan angkatan kerja, (3) kemajuan teknologi yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Sadono Sukirno (2013: 9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Secara konvensional, pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), begitu juga untuk tingkat regional (daerah) dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian, tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Cara menghitung PDB dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan pendapatan yang terdiri dari gaji, sewa, laba, dan bunga. Kedua, pendekatan pengeluaran yang dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto (Mankiw, 2007: 17)Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu negara tertentu selama periode waktu tertentu. Dilihat dari pendekatan pengeluaran, salah satu unsur dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2013: 429-432), adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1). Tanah dan kekayaan alam lainnya Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut, jumlah dan jenis kekayaaan barang tambang yang ada. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor utama (pertanian dan pertambangan).

2). Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak penduduk maka akan meningkatkan tenaga kerja.

Disamping itu sebagai akibat dari pendidikan, latihan dan pengalaman kerja penduduk akan semakin bertambah, maka produktivitas akan meningkat. Namun luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bergantung pada banyaknya pengusaha dalam ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan semakin tingginya jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3). Barang-barang modal dan tingkat teknologi Barang-barang modal dan teknologi penting dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan tekhnologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mempertinggi keefisienan kegiatan produksi, menimbulkan barang-barang baru dan meningkatkan mutu barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

4). Sistem sosial dan sikap masyarakat Dalam negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi pengahalang pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas tinggi. Sikap masyarakat juga menentukan sampai mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sikap masyarakat yang memberi dorongan terhadap pertumbuhan antara lain sikap berhemat untuk berinvestasi, sikap menghargai kerja keras, dan kegiatan lain untuk mengembangkan usaha.

3. Teori pertumbuhan ekonomi

1.) Teori Neoklasik

Menurut Teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi: penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010). Analisis teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat penggunaan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya output yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi juga sangat diharapakan dapat tercapai. Adapun indikasi dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas serta pendapatan perkapita yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dalam usaha peningkatan pembangunan ekonomi, Pemerintah berupaya mengelola sumber daya dengan sebaik mungkin melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara bermitra dengan masyarakat guna membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut. Pada umumnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan belanja modal meskipun terkadang jumlahnya tidak terlalu signifikan.

2.) Teori pertumbuhan klasik

Adam Smith merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Boediono (2018:7), Adam Smith merupakan orang pertama yang mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis yang terdiri dari dua aspek utama yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776*).

Perhitungan output dapat digunakan pada tiga variabel yatu sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan persediaan modal. Sedangkan pada faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya mengenai spesialisasi dan pembagian kerja. Menurut Smith makin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja, dan selanjutnya semakin tinggi produktivitas per pekerja. Adanya pembagian kerja juga harus diimbangi dengan akumulasi modal. Perluasan juga perlu dilakukan agar dapat menampung hasil produksi. Perluasan pasar bisa dilakukan dengan adanya perdagangan internasional. Adam Smith juga berpendapat bahwa proses pertumbuhan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningktan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar sehingga

akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Namun pertubuhan ekonomi terdapat kendala yaitu keterbatasan sumber daya yang merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan perkembangannya dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dari David Ricardo ialah the law of diminishing return dalam bukunya yang berjudul *"The Principles of political Economy and Taxation"* (1917). Dalam pemikirannya berisi mengenai terjadinya penurunan terhadap ketersediaan produk marginal disebabkan karena terbatasnya jumlah tanah. Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu pertumbuhan akan tercapai secara optimal

3.) *Teori Rostow and Musgrave*

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

Teori Makro, teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh Para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

3. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
4. Hukum wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
5. *Teori peacock & wiseman*

TeoriRostow and Musgrave dalam Guritno(1999) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah

masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

Teori Mikro, tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini :

1. Perubahan permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga – harga faktor – faktor produksi

4.) Teori pertumbuhan endogen

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) memiliki peran dalam menjelaskan model pertumbuhan yang lebih maju, dimana perubahan teknologi bersifat endogen

(berasal dari dalam sistem ekonomi) dan memiliki pengaruh pada pertumbuhan jangka panjang. Pengertian modal dalam model ini tidak sekedar modal fisik (physical capital), tetapi mencakup pula modal manusia *(human capital).* Selain itu, teori ini mengasumsikan tingkat pengembalian yang meningkat *(increaing return to scales)* pada fungsi produksi agregatnya dan menekankan peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian investasi modal (Arsyad, 2010). Teori pertumbuhan endogen merupakan modifikasi dari teori-teori pertumbuhan tradisional dan dirancang untuk menjelaskan fenomena ekuilibrium dalam jangka panjang yang bisa positif dan bervariasi antarnegara. Menurut teori ini, faktor - faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarnegara 29 adalah adanya perbedaan stok pengetahuan, kapasitas modal fisik, kualitas modal manusia, dan ketersediaan infrastruktur. Lebih lanjut, dalam proses pertumbuhan endogen dimungkinkan pula ruang bagi munculnya kebijakan, baik pada perekonomian tertutup maupun perekonomian terbuka.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam Guritno (1999) mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori mikro dan teori makro.

a.) Teori Makro

Teori Makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu :

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3. Teori Peacock & Wiseman

2. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana misalnya seperi pendidikan, kesehatan, transportasi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Selanjutnya peranan pemerintah pada tahap menengah, pada tahap ini peranan pemerintah tetap besar oleh karena peranan swasta yang semakin besar yang banyak menimbulkan kegagalan pasar dan njuga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang semakin rumit *"complicated"*misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musragve berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagai nya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

3. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara – negara US, Eropa dan Jepang pada abad ke 19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut : " dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat ". Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara – negara maju (USA, German, Jepang) tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa pernana pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

4. Teori Peacock and Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang mana tujuannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. jadi masyarakat

menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara semena – mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut :

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

b.) Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dalah untuk menganalisis faktor – faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan mellaui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan prmintaan akan barang lain. Sebagai contih misalnya, pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara yang akan menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta seperti semen, baja, alat – alat konstruksi lainnya. Teori Mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penentuan permintaan ;

U^i = f (G,X)

G : Vektor dari barang publik

X : Vektor barang swasta

i : individu ; i = 1,..., m

U : fungsi utilitas

Seoarang individu mempunyai permintaan akan barang – barang publik dan barang – barang swasta, akan tetapi permintaan efektif akan barang – barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran *(budget constrains)*. perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini :

1. Perubahan permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga – harga faktor produksi

2.1.4 Dana Transfer

1. Teori Transfer Menurut *Rosen & Gayer* (2010)

Secara umum terdapat dua jenis transfer, yaitu: Transfer bersyarat (*Conditional Grants*) dan Transfer Tidak Bersyarat (*Unconditional Grants*). Transfer bersyarat merupakan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Transfer tidak bersyarat merupakan transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang pengelolaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah dan diawasi oleh pemerintah pusat. Transfer ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan antar daerah dan merupakan dana pendukung pelaksanaan program/ proyek

pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Pemerintah Pusat juga menetapkan tujuan yang spesifik dalam penggunaan dana transfer bersyarat.

Ada beberapa jenis transfer bersyarat, yaitu: *Matching Grants*, *Matching Closed Ended Grants*, dan *Nonmatching Grants*. *Matching Grants* Merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang diberikan sesuai dengan dana yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam transfer *Matching Grants* pengalokasiannya sudah ditetapkan pada program/proyek tertentu. Transfer *Matching Grants* memiliki dua pengaruh bagi daerah, yaitu: Pertama, pengaruh pendapatan (*income effect*), yaitu adanya bantuan menyebabkan peningkatan pendapatan daerah penerima. Kedua, pengaruh substitusi atau harga (*price* atau *substitution effects*), yaitu bantuan menyebabkan perubahan pada harga relatif barang publik yang disubsidi terhadap barang publik lain yang tidak disubsidi. *Matching Closed-Ended Grants* menempatkan batasan seberapa banyak Pemerintah Pusat akan memberikan kontribusi. *Nonmatching Grants* digunakan untuk membiayai penyediaan barang publik. Bantuan atau tambahan dana akan menggeser atau merubah garis anggaran daerah penerima bantuan.

Teori Transfer Menurut Shah (2007)

Transfer dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu: *General-Purpose Transfers (unconditional)* dan *Specific-Purpose Transfers (conditional or earmarked).General-Purpose Transfers* diberikan sebagai dukungan anggaran tanpa syarat yang mengikat. Ciri utama dari transfer *General-Purpose Transfers* adalah daerah memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbanganpertimbangannya sendiri atau sesuai dengan apa yang menjadi prioritas di daerahnya. Pembagian transfer tanpa syarat biasanya berdasarkan suatu formula tertentu.

Transfer ini dapat dibelanjakan untuk kombinasi barang atau jasa publik atau digunakan untuk memberikan keringanan pajak kepada penduduk. *Specific-Purpose Transfers* digunakan untuk program atau kegiatan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Sehingga dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan program atau kegiatan tersebut. Terdiri dari: *Nonmatching Transfers*

dan Matching Transfers. *Nonmatching transfers* merupakan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah dana penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa Pemerintah Daerah telah/akan mengalokasikan dananya dalam jumlah besar atau kecil.

Matching Transfers merupakan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu. Jadi disini, pemerintah daerah telah mengalokasikan sejumlah dana dari pendapatan daerahnya untuk penyelenggaraan urusan tersebut. Transfer ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni: *Open-Ended Matching Grants* dan *Closed-Ended Matching Grants*. *Transfer Open-Ended Matching Grants* ditujukan untuk menutupi seluruh kekurangan dana yang terjadi. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak ada memiliki batasan dalam menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada transfer *ClosedEnded Matching Grants* terdapat batasan jumlah dana maksimum yang dapat digunakan. Hal ini sangat disukai oleh Pemerintah Pusat, karena walaupun dana yang diberikan sesuai dengan besar proyek, namun setelah besarnya biaya proyek melampaui jumlah tertentu, pemberi bantuan dapat mencukupkan bantuannya.

Pada tahun 2018 desentralisasi fiskal di Indonesia dilaksanakan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (public service delivery) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam struktur Belanja Negara pada APBN, TKDD terdiri dari dua bagian besar, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan Dana Desa yang diberikan kepada desa. TKDD terdiri dari 4 (empat) unsur utama, yaitu Pertama, Dana Perimbangan, terdiri dari (i) Dana Transfer Umum (DTU), yaitu jenis dana transfer yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dengan memperhatikan aspek otonomi, serta keseimbangan dan pemerataan kemampuan keuangan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Bagi Hasil (DBH); Dana Transfer Khusus (DTK), yaitu dana yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kegiatan yang sudah diarahkan atau ditentukan penggunaannya untuk meningkatkan layanan publik dan pencapaian prioritas nasional, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Kedua, Dana Insentif Daerah (DID), yang dialokasikan untuk memberikan insentif dan sekaligus sebagai instrumen untuk memacu peningkatan kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Keistimewaan (Dais), yaitu jenis dana transfer yang dialokasikan khusus untuk daerah-daerah yang mendapatkan kebijakan otonomi asimetri sesuai undang-undang, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh, serta Provinsi DI Yogyakarta. Keempat, Dana Desa, yang dialokasikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dari APBN untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan undang- undang mengenai desa. Kemudian dalam tahun 2018 terdapat 5 (lima) kebijakan reformulasi DAU sebagai instrumen desentralisasi fiskal untuk pemerataan fiskal antar daerah, sebagai berikut: Pertama, pagu DAU Nasional dalam APBN ditetapkan tidak lagi bersifat final atau bersifat dinamis, artinya besaran DAU dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto dalam APBN tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar daerah mempunyai kesadaran terhadap adanya risiko penerimaan negara, sehingga menjadikan daerah lebih efisien, efektif, dan produktif dalam belanjanya, dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai konsekuensinya, maka daerah harus menyiapkan strategi untuk menghadapi perubahan alokasi DAU, dengan antara lain menyisihkan sebagian dari pendapatan daerah untuk membentuk dana cadangan (buffer stock), melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja APBD dengan memperhatikan prioritas daerah, serta membuat sistem kontrak pekerjaan secara fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan anggaran. Kedua, melakukan penyempurnaan formula distribusi DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar (gaji PNSD), bobot masing-masing variabel celah fiskal, baik kebutuhan fiskal maupun kapasitas fiskal

daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah melalui penyesuaian ke atas DAU masing-masing daerah yang mengalami penurunan secara signifikan alokasi DAU dan penyesuaian ke bawah bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan DAU yang sangat tinggi. Ketiga, menyesuaikan secara proporsional pembagian pagu alokasi DAU Nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan pengalihan kewenangan urusan pemerintahan Keempat, memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan melalui kebijakan peningkatan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah dari semula 50% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi menjadi 100%. Dengan kebijakan ini, maka alokasi DAU untuk daerah berciri kepulauan meningkat dari Rp26,72 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp27,78 triliun. Kelima, mewajibkan kepada daerah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) setiap daerah untuk membiayai belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

2.1.5 Pengangguran

Menurut Suparmoko (2007) pengangguran adalah ketidak mampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statisitk (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sukirno (2008) menjelaskan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya.

a.) Teori Pengangguran

Berikut ini ada beberapa teori tentang pengangguran, yaitu :

- Teori Klasik

  Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2004). Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000).
- Teori Keynes

  Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya

beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi

- Teori Kependudukan dari Malthus

  Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yag cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderug tumbuh secara "deret hitung" (misalnya, dalam deret 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secata tidak terbatas hingga mencapai bata persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam janngka panjang tidak ada kemajuann teknologi yang mampuu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan "pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memprodusir makanan untung menjaga kelangsungan hidup manusia". Apabila ditelaah lebih dalam toeri Malthus ini yang menyatakan penduduk cederung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghassilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manussia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

- Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

  Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif.

Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep "kelas buruh " tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi. Dari uraian diatas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pamasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu baroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

b.) Jenis – jenis pengangguran

- Pengangguran Berdasarkan Penyebab nya dibagi menjadi 4 kelompok (Sukirno,1994) yaitu :

1) Pengangguran Normal atau Friksional Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan

pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaanya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur.

2) Pengggangguran Siklikal Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah

3) Pengangguran Struktural Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.

4) Pengangguran Teknologi Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

- Pengangguran Berdasarkan Cirinya (Sukirno,1994) yaitu :

1) Pengangguran Terbuka Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.
2) Pengangguran Tersembunyi Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani

dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3) Pengangguran Musiman Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.
4) Setengah Menganggur Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur *(underemployed)*. Dan jenis pengangguranya dinamakan *underemployment*.

c.) Akibat Buruknya Pengangguran Terhadap Perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan

ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

d.) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja. Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari Tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagi persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$\textbf{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\textit{jumlah pengangguran}}{\textit{jumlah angkatan kerja}} \textbf{ x 100}$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah penganguran (underemployment) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan,

serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (severely underemployment) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu. Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan

2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha

3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.

4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

2.1.6 Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) dalam *Case and Fair* (2006) adalah nilai pasar total output suatu negara. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu oleh faktor – faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara. Sebagaimana suatu perusahaan individual perlu mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan operasinya tiap tahun,demikian pula perekonomian secara keseluruhan perlu menilai dirinya sendiri. PDB sebagai ukuran produksi total suatu perekonomian “buku rapor” ekonomi suatu negara karena PDB merupakan suatu konsep penting, buku ini akan memberi ruang untuk menerangkan makna definisinya dengan tepat.

- Menghitung PDB

PDB dihitung dengan dua cara salah satunya adalah menjumlahkan semua jumlah total yang dibelanjakan pada semua barang akhir selama periode tertentu. Ini adalah **Pendekatan Pengeluaran** dalam menghitung PDB. Pendekatan lainnya adalah menjjmlahkan pendapatan upah, sewa, bunga dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam menghasilkan barang akhir ini adalah **Pendekatan Pendapatan** dalam menghitung PDB Kedua metode ini menghasilkan nilai PDB yang sama.

1. Pendekatan Pengeluaran

Ada empat kategori pengeluaran :

- Pengeluaran konsumsi pribadi (C) : belanja rumah tangga atas barang konsumen
- Investasi swasta dalam negeri bruto (I) : belanja oleh perusahaan dan rumah tangga atas modal baru seperti pabrik, peralatan, persediaan dan strukur perumahan baru
- Konsumsi dan investasi bruto pemerintah (G)
- Ekspor neto (EX-IM) : belanja neto oleh negara lain di dunia atau ekspor (EX) minus impor (IM)

Pendekatan pengeluaran menghitung PDB dengan menjumlahkan keempat komponen belanja ini. Dalam bentuk persamaan :

$$PDB = C + I + G + (EX - IM)$$

2. Pendekatan Pendapatan

Dimulai dengan konsep **Pendapatan Nasional**yang mana Pendapatan Nasional sendiri adalah jumlah delapan butir pendapatan diantara nya yaitu ada, **Kompensasi Karyawan**meliputi upah dan gaji yang dibayarkan pada rumah tangga perusahaan dan pemerintah, **Pendapatan Perusahaan Perseorangan** adalah pendapatan bisnis yang tidak berbentuk perseroan, **Pendapatan Sewa** adalah pendapatan yang diterima oleh pemiliki properti dalam bentuk sewa, **Laba Perseroan Terbatas** adalah pendapatan korporasi, **Bunga Neto** adalah bunga yang dibayarkan oleh bisnis, **Pajak Tak Langsung dikurangi Subsidi** meliputi (pajak penjualan, bea cukai dan ongkos lisensi dikurangi subsidi yang dibayar oleh pemerintah), **Pembayaran Transfer Bisnis Neto** adalah pembayaran transfer neto oleh bisnis pada pihak lain sehingga menjadi pendapatan pihak lain, **Surplus Perusahaan Pemerintah** yang merupakan pendapatan pendapatan perusahaan – perusahaan pemerintah.

- PDB Nominal dan PDB Ril

PDB Nominal adalah PDB yang diukur dengan nilai uang saat ini – semua komponen PDB dinilai pada harga saat ini sedangkan PDB Ril adalah PDB Nominal yang disesuaikan dengan perubahan harga.

- Produk Domestik Bruto Deflator (PDB Deflator)

Dari PDB Ril maka beralih ke PDB Deflator suatu ukuran harga, salah satu tujuan para pengambil kebijakan adalah mempertahankan perubahan dalam semua tingkat harga keseluruhan tetap kecil. Karena alasan ini, pengambil kebijakan tidak hanya memerlukan ukuran yang baik tentang bagaimana output rill berubah tapi juga ukuran yang baik tentang bagaimana tingkat harga keseluruhan berubah, PDB Deflator adalah ukuran tingkat harga keseluruhan

PDB Deflator adalah pendekatan kedua untuk mengukur laju inflasi. Perumusan dari deflator PDB adalah PDB nominal dibagi dengan PDB ril :

$$\text{PDB DEFLATOR} = \frac{\text{PDB NOMINAL}}{\text{PDB RIL}} \times 100$$

Para ekonom menyatakan bahwa deflator PDB lebih baik dari IHK karena deflator PDB mencakup semua produk akhir yang dikonsumsi oleh sektor rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan ekspor. Meskipun demikian, IHK mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu dapat dipublikasikan setiap bulan, sehingga memberikan indikator laju inflasi secara teratur dibandingkan deflator PDB yang dipublikasikan setiap tiga bulan sekali.

2.1.7 Teori Inflasi

a. Teori inflasi menurut para ahli

Menurut *Keynes* dalam Iskandar (2010) bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Selama gap inflasi masih tetap ada maka besar kemungkinan inflasi dapat terjadi apabila kekuatan-kekuatan

pendukung dalam perekonomian tidak digalakkan (misalnya kebijakan pemerintah dalam bentuk belanja pemerintah, kebijakan fiscal, kebijakan luar negeri dan lain sebagainya).Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian models ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Atmadja (1999)

Menurut Teori Strukturalis dalam Iskandar (2010) teori ini menyoroti sebab - sebab inflasi yang berasal dari kekuatan struktur ekonomi, khususnya ketegaran uplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural pertambahan barang - barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industry barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah.

Menurut Teori Kuantitas (Tajul Khalwaty, 2000:5) teori ini adalah yang paling tua mengenai inflasi, teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang beredar dan (b) psikologi/harapan masyarakat akan kenaikan harga – harga *(expectation).*

Menurut Teori Klasik (Tajul Khalwaty, 2000:5) teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang serta nilai uang dan harga.

b. Pengertian Inflasi

Menurut Iskandar (206:2010) Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riel tingkat

pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara rill pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% jugaInflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya, harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi.

c. Jenis Inflasi

Dalam ilmu ekonomi inflasi terbagi beberapa jenis yaitu :

- Inflasi Menurut derajatnya

1) Inflasi Rendah *(Creeping Inflation)*

2) Inflasi Menengah *(Galloping Inflation)*

3) Inflasi Tinggi *(High Inflation)*

4) Inflasi Sangat Tinggi *(Hyperinflation)*

Inflasi Rendah yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Inflasi Menengah yaitu inflasi yang besarnya antara 10- 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya hargaharga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Inflasi Berat yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Inflasi Sangat Tinggi yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

- Inflasi Menurut penyebabnya

1) Demand Pull Inflation.

2) Cost Push Inflation

3) Bottle Neck Inflation

Demand Pull Inflation. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. *Cost Push Inflation* Inflasi ini disebabkan kerena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi. *Bottle Neck Inflation* Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran *(supply)* atau faktor permintaan (demand). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi kerena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan *(monetary)* atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permitaan baru.

- Inflasi menurut asalnya

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation). Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.
2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya 21 nilai tukar) yang

secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu (bi.go.id). Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Menanggapi definisi di atas, Rahardja dan Manurung (2008:165) mengemukakan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan inflasi apabila telah memenuhi tiga komponen, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus. Artinya, menurut Rahardja dan Manurung (2008:165), kenaikan harga suatu komoditas belum bisa dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan hargaharga secara umum naik. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum dikatakan inflasi jika terjadi hanya sesaat. Perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimalbulanan, sebab dalam sebulan akan terlihat apabila kenaikan harga bersifat umum dan terus menerus.

Terdapat empat indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu Rahardja dan Manurung (2008:173) yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen *(Consumer Price Imdex)*

2. Indeks Harga Perdagangan Besar *(Wholesale Price Index)*

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

4. Alternatif dari Indeks Harga Implisit

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weigthed) berdasarkan tingkat keutamaannya (Rahardja dan Manurung, 2008:173). Essien (2005) berpendapat bahwa indeks harga konsumen (IHK) mengukur harga keranjang perwakilan

barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen rata-rata dan dihitung atas dasar survei periodik harga konsumen. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks harga konsumen (IHK) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Inflasi = \frac{(IHK - IHK - 1)}{IHK - 1} \text{ X } 100\%$$

Indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi (Rahardja dan Manurung, 2008:175) atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Inflasi = \frac{(IHPB - IHPB - 1)}{IHPB - 1} \text{ X } 100\%$$

Indeks Harga Implisit (GDP Deflator) dianggap menggambarkan inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya. Angka deflator didasarkan pada harga yang berlaku dan konstan, dan dapat dihitung dengan rumus:

$$Inflasi = \frac{(IHI - IHI - 1)}{IHI - 1} \text{ X } 100\%$$

Alternatif dari indeks harga Implisit digunakan jika pada saat menghitung inflasi dengan menggunakan Indeks Harga Implisit (IHI) tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data. Karena prinsip dasar perhitungan inflasi berdasarkan deflator PDB (GDP deflator) adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil (Rahardja dan Manurung, 2008:175), maka bias di atasi dengan menghitung selisih keduanya. Atau dapat dikatakan:

d. Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut Sukirno (2008:339), biaya yang terus-menerus

naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Menurut Sukirno (2008:339),kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran Internasional. Maka ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produk dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi lebih murah. Maka lebih banyak impor yang dilakukan.

Di samping efek buruk di atas, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut ini kepada individu dan masyarakat (Sukirno, 2008:339):

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.

2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

3. Memperburuk pembagian kekayaan.

Beberapa masalah sosial (Rahardja dan Manurung (2008:177). yang muncul dari inflasi yang tinggi (> 10% per tahun) adalah:

1. Menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat.

2. Makin buruknya distribusi pendapatan

3. Terganggunya stabilitas ekonomi.

Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan (pendapatan riil) makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Dampak terburuk akan terjadi jika tingkat inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan tingkat pendapatan. Jika inflasi mencapai angka 20% per tahun, dalam masyarakat hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatannya > 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil (pertumbuhan pendapatan nominal dikurangi laju inflasi lebih besar dari 0% per tahun). Tetapi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil (Rahardja dan Manurung (2008:177). Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga - harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa akan terus naik. Bagi

konsumen perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya. Tujuannya adalah untuk menghemat pengeluaran konsumsi (Rahardja dan Manurung (2008:178).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama &Tahun penelitian	Judul	Metode	Hasil
Uhise,S 2012.	Dana alokasi umum pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan variabel interventing	Asosiatif dengan statistik jalur	DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAU berpengarun terhadap Belanja Modal
Rimawan,M dan Aryani,F 2019	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, IPM, serta Kemiskinan di Kabupaten Bima	WARP PLS 3.0	ADD berpengaruh positif Terhadap pertumbuhan Ekonomi dan IPM Sedangkan ADD tidak Berpengaruh terhadap kemiskinan
ArinaM.M, KoleanganR.A.M dan EngkaD.S.M 2019	pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan ekonomi Kota Manado	Regresi Berganda	PAD bertanda positif Berpengaruh positif Signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado sedangkan DBH,DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Hasan, M (2015)	Pengaruh Dana Tranfer Pusat Terhadap PE	Data panel	Variabel dana transfer dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap

Nama &Tahun penelitian	Judul	Metode	Hasil
	daerah Kab/Kota di SULSEL		Pertumbuhan Ekonomi
Kusuma H 2016	Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Data Panel	Desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak Pada pertumbuhan ekonomi Terutama dari kontribusi Belanja yang dilakukan Oleh pemerintah daerah
Paksi AKE 2016	Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung	Regresi linier berganda	PAD tidak signifikan dengan tenaga kerja, tingkat pendidikan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung
Pramesthi R.N 2012	Pengaruh pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggelek	OLS	Variabel pengangguran dan Inflasi bersama – sama Berpengaruh signifikan Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggelek
Chandra,Doni 2017	Dampak dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah provinsi Jambi	Analisis regresi	Dana perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.Namun demikian, dana perimbangan juga berdampak buruk terhadap peningkatan ketimpangan antar daerah
Amelia dan	Efektivitas transfer	Data panel	DAU secara statistik

Nama &Tahun penelitian	Judul	Metode	Hasil
Ekobelawati F 2018	Pemerintah pusat Terhadap perekonomian Kalimantan Barat		signifikan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Secara positif di Provinsi Kalimantan Barat
Wardhana A Juanda B Kodrat W 2013	Dampak transfer Pemerintah pusat Terhadap ketimpangan daerah	Data panel	Penentuan daerah kaya dan daerah miskin menggunakan median PDRB perkapita
Adissya M.C dan Ispriyarso B 2019	Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia	yuridis normatif analisis kualitatif	belum ada peraturan perundang-undangan yang secara specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal

2.3. Kerangka Pemikiran

Desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dengan cara memberikan dana transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dana transfer dapat menstimulus pembangunan daerah yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Provinsi Lampung

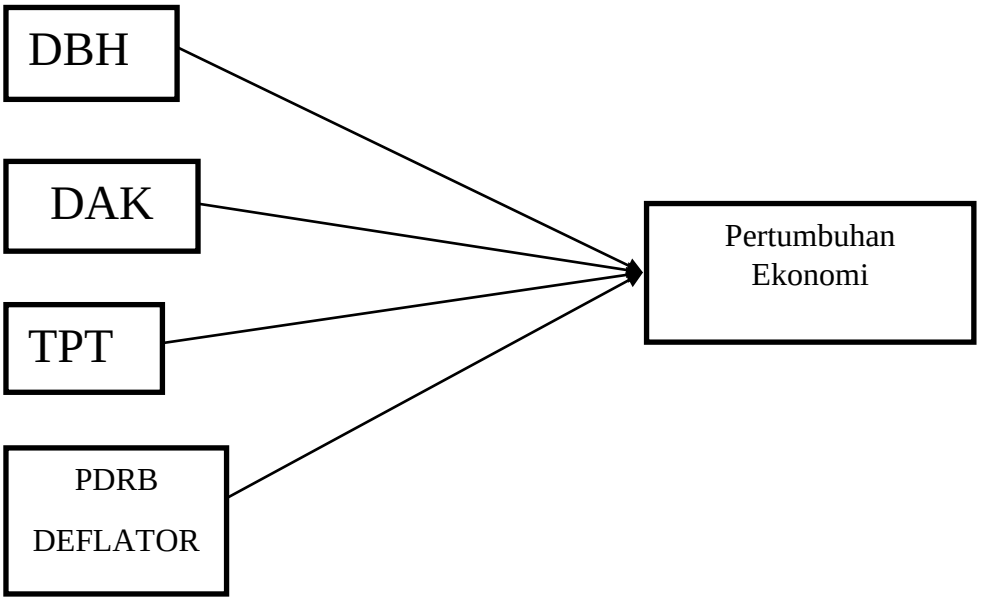

Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran

2.4. Hipotesis

1. Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
2. Diduga Dana Alokasi Khusu (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
3. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
4. Diduga PDB Deflator (PDRBD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Provinsi Lampung

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian & Sumber Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dalam angka-angka. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017) yaitu diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengaju hipotensis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur pengaruh dana transfer (DBH dan DAK)tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan PDRB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

3.1.2. Sumber Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mengukur pengaruh dana transfer DBH dan DAK)Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB Deflator terhadap pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, sedangkan dana alokasi umum (DBH dan DAK) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan PDRB Deflator sebagai variabel bebas. Data yang digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistika dan Direktorat JenderalPerimbangan Kementerian Keuangan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk mengukur bagaimana pengaruh dana transfer (DBHdan DAK)Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB Deflator terhadap pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung.

Untuk melihat pengaruh keterkaitan antar variabel, variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB Deflator.

a. Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)

   Data pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat yang digunakan berupa data pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika.

b. Dana Bagi Hasil (dalam ribuan rupiah)

   Data Data dana bagi hasil sebagai variabel bebas yang digunakan berupa data dana bagi hasil pajak masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2015–2019. Data ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

   APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen)

   Data tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel bebas yang digunakan berupa data tingkat pengangguran terbuka dalam persen dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2015-2019.Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistika.

d. Dana Alokasi Khusus (dalam ribu rupiah)

Data Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas yang digunakan berupa data Dana Alokasi Khusus non fisik masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2019. Data ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

e. PDRB Deflator (dalam persen)

Data PDRB Deflator sebagai variabel bebas yang digunakan berupa data PDB Deflator masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2019. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari perhitungan rasio antara PDB rill dengan PDB nominal dikalikan 100.

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

Variabel	Simbol	Satuan pengukuran	Sumber Data
Pertumbuhan ekonomi	Growth	Persen	BPS
Dana Bagi Hasil	DBH	Juta Rupiah	DJPK kemenkeu
Dana Alokasi Khusus	DAK	Juta Rupiah	DJPK kemenkeu
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	BPS
PDRB Deflator	PDBD	Persen	BPS

3.2.1 Model Persamaan Variabel

$GROWTH$ = β0 + β1 $lnDBH_{1t}$ + β2 $lnDAK_{2t}$+ β3 TPT_{3t}+ β4 $PDBD_{4t}$+ et

Keterangan :

$GROWTH$ = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota i Pada Tahun t

$lnDBH_{1t}$=Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota i Pada Tahun t

$lnDAK_{2t}$+ = Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota i pada tahun t

TPT_{3t}+ = Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota i pada tahun t

$PDBD_{4t}$+ = PDB Deflator Kabupaten/Kota i pada tahun t

β_0= Konstanta

β_1 , β_2 , β_3 , β_4 = koefisien regresi terhadap pertumbuhan ekonomi

et= error term

3.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian yaitu dilakukan dengan menggunakan 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2015 hingga 2019,

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Menurut (Widarjono, 2018) Metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data time series atau cross section, yaitu :

a. Data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar.

b. Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*ommited-variabel*).

Beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu :

a. *Common Effect Model* Teknik yang digunakan dalam metode *Common Effect Model* hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar kabupaten/kota jelas sangat berbeda. Adapun bentuk utama dari *Common Effect Model* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_i X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

b. *Fixed Effect Model* Teknik yang digunakan dalam metode *Fixed Effect Model* adalah dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar kabupaten/kota dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar kabupaten/kota namun sama antar waktu (*time invariant*). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Adapun bentuk utama model *Fixed Effect Model* sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta + \beta_i X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_5 D_{3it} + U_t$$

c. *Random Effect Model* Tenik yang digunakan dalam Metode Random Effect adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms)* yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar

kabupaten/kota. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan *Metode Generalized Least Square (GLS)*. Adapun bentuk utama dari *Random Effect Model* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + (\in_{it} + Y_i)$$

Untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut, yaitu dengan cara melakukan Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier .

a. Uji Chow

Pengujian untuk menentukan model apakah CEM atau FEM yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* lebih baik dari metode *Common Effect.* Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut :Ho = Model yang digunakan *Common Effect* ; jika nilai p – value >α, dan H1 = Model yang digunakan *Fixed Effect* ; jika nilai p – value <α

b. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables (LSDV)* dalam metode - metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares (GLS)* dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares(OLS)* dalam metode *Common Effect tidak efisien* .Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut : Ho = *OLS* tidak efisien *(REM)* ; jika p – value >$\alpha, dan,$ H1 = *OLS* efisien *(FEM)* ; jika nilai p – value <α

c. Uji Langrange Multiplier

Uji LM digunakan untuk membandingkan apakah *random effect model* lebih baik daripada *common effect model*. uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan . Metode Breusch Pagan untuk

menguji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect.* Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut. Hipotesis dari Uji LM adalah :Ho = *Model Common Effcet* ; p – value lebih > nilai $\alpha, dan,$ H1 = *Model Random Effect* ; p – value < nilai α

3.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residualnya tersebar secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan *Jarque Berra Normality Test*. Pada metode ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic* Selain itu, nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi *Chi square* dengan dengan derajat kebebasan (df) = 2

H_0 = Residu terdistribusi secara normal

H_a = Residu terdistribusi secara tidak normal

Apabila nilai X^2 (Chi square) Statistik lebih kecil dari nilai X^2 (Chi square) hitung maka H0 diterima, dalam arti bahwa residualnya tersebar secara normal. Nilai X^2 (Chi square) Statistik diperoleh dari nilai Jarque Berra.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa linier sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien masing – masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi diantara masing – masing variabel bebas le bih dari 0,8 maka terjadi multikolinieritas dan sebaliknya, jika koefisien korelasi antara masing – masing variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinieritas yaitu :

H_0 = tidak terdapat multikolinieirtas

H_a = terdapat multikolinieritas

Melalui pengujian sebagai berikut :

Jika nilai koefisien korelasi > 0,8 maka H_0ditolak, artinya terdapat

multikolinieirtas dan jika H_0 diterima artinya tidak terdapat multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya hubungan atau korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, otokorelasi sebagai hubungan antara galat yang satu dengan galat yang lain (Widarjono. 2018 : 137). Otokorelasi dalam sampel runtut waktu menunjukkan kecenderungan sekuler atau perubahan jangka panjang. Otokorelasi juga dapat disebabkan karena adanya bias spesifikasi atau karena salah satu pada variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut merupakan nilai lag dari variabel terikat.

Untuk mendeteksi adanya otokorelasi, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan :

1. Memperhatikan nilai Durbin-Watson (DW) statistik. Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai DW statistik relatif kecil, dengan contoh yakni dibawah 1 ataupun diatas 3 maka adanya otokorelasi. Hal ini didukung oleh Durbin-Watson dalam Field (2018) bahwa dengan didapatkan nilai DW dibawah 1 ataupun diatas 3 maka menjadi perhatian dan disimpulkan adanya otokorelasi. Asumsi yang digunakan dalam otokorelasi uji Durbin-Watson yakni:

   H_0 :Tidak ada Otokorelasi ($1 > D \leq 3$)
   H_a : Ada otokorelasi ($D < 1$ atau $D > 3$)

   Selain itu, guna mengetahui nilai Durbin-Watson dapat menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.2 Uji Statistik Durbin-Watson d

Nilai Statistik d	Hasil
$0<d<d_L$	Menolak hipotesis nol; adanya otokorelasi positif
$d_L<d<d_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U<d<4-d_U$	Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada otokorelasi positif/negatif
$4-d_U<d<4-d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4-d_L<d<4$	Menolak hipotesis nol; ada otokorelasi negatif

Sumber: Widarjono, Agus. 2018. Ekonometrika Edisi ke-5

4. Heterokedastisitas

   Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi adalah tidak adanya gejala Heterokedastisitas.

   H_0 = *Homokedastisitas* (residu seragam)

   H_a = *Heterokedastisitas* (residu tidak seragam)

3.6 Uji Statistik

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H_0). Keputusan untuk gagal menolak atau menolak H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data. Dalam hipotesis penelitian dalam menggunakan data sampel dengan menggunakan uji t adalah masalah pemilihan apakah menggunakan dua sisi atau sama sisi.Adapaun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji t untuk Dana Bagi Hasil (DBH)

- $H0_{(1)} : \beta_1 \geq 0$

  DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

- $Ha_1 : \beta_1 < 0$

  DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

2. Uji t untuk Dana Alokasi Khusus (DAK)

- $H0_{(2)} : \beta_1 \leq 0$

  DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

- $Ha_2 : \beta_1 > 0$

  DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

3. Uji t Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- $H0_{(3)} : \beta_1 \geq 0$

  TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap
  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten//Kota Provinsi Lampung

- $Ha_3 : \beta_1 < 0$

  TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

4. Uji t PDB Deflator (PDBD)

- $H0_{(4)} : \beta_1 \geq 0$

  PDBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Provinsi Lampung

- $Ha_4 : \beta_1 < 0$

  PDBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Provinsi Lampung

3.7 Uji pengaruh Keseluruhan (Uji f)

Uji f merupakan uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama – sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/nonsignifikan. Uji f dilakukan dengan membandingkan F – Kritis dengan F – Hitung Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$

Ha = $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$ (salah satu variabel bebas $\neq 0$)

Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H_0 adalah :

- Jika nilai $F_0 > F_a$, maka H_0 ditolak atau menerima H_a . artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi
- Jika nilai $F_0 < F_a$, maka H_0 diterima atau menolak H_a . artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap pertumbuhan ekonom

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana transfer yang diwakili oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015 - 2019
2. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2015-2019. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran dalam mendanai kebutuhan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) dibagikan kepada daerah dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang ditetapkan dalam Undang – Undang No.33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang di bagi hasilkan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2015-2019. Hasil ini menujukkan bahwa DAK memiliki peran dalam membiayai kebutuhan khusus suatu daerah guna membantu memenuhi kebutuhan khusus suatu daerah dan meningkatkan perekonomian daerah

tersebut, kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamatkan DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, pelaksaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan,pengadaan,peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada penelitian ini pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2015-2019.Pada tahun 2015 – 2019 Provinsi Lampung mengalami kenaikan jumlah penduduk,kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Lampung sebanyak 7.932.132 jiwa, kenaikan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap tingkat jumlah lapangan pekerjaan yang ada diwilayah Provinsi Lampung dikarenakan jumlah umur angkatan kerja yang bekerja akan mengalami peningkatan
5. PDB Deflator berpengaruh negatif dan signifikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2019. PDB Deflator adalah rasio PDB Nominal terhadap PDB rill perubahannya mengukur pergerakan harga agregat dalam perekonomian,karena nya merupakan indikator inflasi, berbeda dengan IHK dan IHP Deflator PDB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian (harga bahan baku,produk setengah jadi,produk akhir).

5.2 Saran

1. Pada Provinsi Lampung penggunaan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah memiliki peran dalam pembangunan daerah selain itu penggunaan dana transfer ini dapat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah ,mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah maka dari itu perlu lah menggunakan Dana Transfer ini sebaik mungkin dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Lampung
2. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan ini tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah. Hal ini terbukti dengan masih rendah indikator kemandirian fiskal dan timpang secara kewilayahan. Selain itu, penerimaan dana transfer pemerintah pusat ke daerah ini juga membuat daerah semakin ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka dari itu perlu bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan hasil potensi yang ada di daerahnya dan juga meningkatkan Eksistensi Pendapatan, Intensifikasi Pendapatan dan Penguatan Kelembagaan.
3. Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Walaupun memiliki Prinsip *"by origin"* dimana daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah bukan penghasil, namun banyak daerah Penghasil masih tidak puas dengan pembangian DBH karena masih banyaknya masyarakat miskin di daerah kaya penghasil sumber daya alam dan Terkadang masih kekurangan pasokan energi, ketidakpastian ini DBH menjadi salah satu hal yang dikeluhkan pemerintah daerah. Maka dari itu penting nya transparasi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak – pihak terkait dalam pembagian DBH
4. Koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK antar instansi baik di pusat maupun di daerah,termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota, terlihat masih terbatas. Selain itu, masih sedikit pemda yang masih sedikit memenuhi kewajibannya untuk melaporkan perkembangan penggunaan DAK setiap 3 bulan (Triwulan) sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundangan –

undangan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat hendaknya membangun sebuah paradigma baru dalam manajemen DAK dengan mendesentralisasi kepada pemerinrah Provinsi sehingga pemerintah provinsi berwenang dalam melaksanakan pengalokasian DAK,pengelolaan DAK dan pengawasaan atas penggunaan DAK oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Dalam penelitian ini Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hasil estimasi negatif tetapi tidak signifikan hal ini disebabkan karena meningkatnya angka pengangguran di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dalam upaya menrunkan Tingkat Penganggguran ini dapat dilakukan
    - Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
    - Menggalakkan kegiatan ekonomi informal
    - Mendirikan pusat – pusat latihan kerja
    - Memanfaatkan penggunaan SmartPhone dan Social media untuk berbisnis online, dan lain – lain.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia dan Ekobelawati, F. 2018. Efektivitas Transfer Pusat Terhadap Perekonomian Kalimantan Barat.*Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. STIE Pontianak

Arina,M.M ., Koleangan,R.A.M dan Engka,D.S.M. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil,Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.20 No.3*. Universitas Sam Ratulangi. Manado

Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Agus Widarjono .2018 . *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* , edisi Kelima . UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). https://lampung.bps.go.id/ 2015-2019. Lampung: BPS (Diakses pada 7 Febuari 2021)

Boediono. 2018. Ekonomi Internasional. 1st ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Case, Karl E *and* Fair, Ray C. 2006. *Prinsip – prinsip Ekonomi*. Erlangga.Jakarta

Chandra, D .2017. Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi . *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 12. No. 2*.

Guritno, M. 1999. *Ekonomi Publik*. BPFE.Yogyakarta .

Hasan,M . 2015 . 13 *PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN*.skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Kementrian Keuangan. *Jurnal BPPK Kemenkeu*.(diakses pada 8 Febuari 2021)

Kusuma,H . 2016 . Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi . *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 9 No. 1*

Kementrian Keuangan .2019. DJPK Direktorat Dana Perimbangan, Pemyusunan Mekanismen Dana Alokasi Khusus untuk Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum . *Jurnal BPPKKemenkeu* . Jakarta

Kementrian Pendidikan . 2017 . Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2016 / 2017 . *kemendikbud* . Jakarta

Mahmudi dan Bambang Saputra . 2011 . Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *JAAI VOLUME 16 NO. 2, DESEMBER 2012: 185–199*

Mankiw, N Gregory . 2012 . *Makroekonomi* . Erlangga . Jakarta

Marselina. 2015 . *Membedah APBD* .Graha Ilmu. Bandar Lampung

Mubyarto. 2002. Meninjau Kembali Ekonomika Neoklasik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 17, No.2, 2002, 119-129.* Yogyakarta.

Muda I, Syafrizal H dan Kholis A . 2014. Kajian Indeks Kontruksi,Pertumbuhan Ekonomi dan belanja modal terhadap IPM di Sumatera Utara.

jurnal dinamika akuntansi dan bisnisVol 1 No 1. Medan

Metasari Kartika. 2015 . Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat) . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2015, Vol. 4, No. 1, 45-71 45* . Universitas Tanjungpura

Sadono . 2004. *Ekonomi pembangunan*. Bima Grafika . Jakarta

Paksi, A.K.E,. 2016. *Analisis faktor – faktor yang mempengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung*. .(skripsi). Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Pramesthi,R.N. 2012 . Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tregnggelek.*ejournal.unisa.ac.id*. Semarang

Purnama, Johadi dan Indra M.Y.2011. *KETERKAITAN INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA: APLIKASI THRESHOLD MODEL.* Pusat Studi Transparansi dan Anti Korupsi–Universitas Sebelas Maret. Fakultas Ekonomi dan Bisnis–Universitas Sebelas Maret

Putra DD. 2016. ***Pengaruh Dana Alokasi Khusus*** dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi ***Sumatera Utara***. https://repositori.usu.ac.id

Ratih, Ayu,. 2015 .*Formula Alternatif dalam Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Dana Alokasi Khusus Kelompok Non Pelayanan Dasar*. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi. Institut Pertanian Bogor

Rimawan, M., Aryani,F. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ,Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No. 3*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Nusa Tenggara Barat

Sukirno, S. 2000. Makroekonomi Modern. PT Raja Drafindo Persada. Jakarta

Sukirno, S,. 2011 .*Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers.Jakarta.

Sukirno, S,. 2013 .*Makro Ekonomi Teori Pengantar* .PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Sugiyono.2017 .Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta CV. Bandung.

Undang – undang No. 22 tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang - undang No. 25 tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*